



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4  
JAKARTA 10710 KCTAK POS 1495  
TELEPON (021) 3449230 (5200), (021) 3847068, FAKSIMILE (021) 3864776

Nomor : S- **64** /PB/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Jadwal Pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan  
LKKL Tahun 2017

04 Januari 2018

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Jaksa Agung Muda/Deputi/Kepala Sekretariat/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana daftar terlampir;
  2. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN) sebagaimana daftar terlampir;
  3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  4. Inspektur III, Itjen Kementerian Keuangan selaku Tim Reviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);

Dalam rangka persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

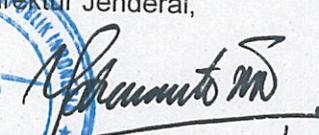
1. Berdasarkan hasil pembahasan antara Kementerian Keuangan, BPK RI, dan BPKP, dengan ini kami sampaikan beberapa tanggal penting terkait jadwal pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL Tahun 2017, untuk menjadi acuan masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga dan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Penyampaian LKKL ( <i>Unaudited</i> ) oleh K/L dan LKBUN ( <i>Unaudited</i> ) oleh UABUN kepada BPK untuk diaudit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Paling lambat 21 Feb 2018 (K/L dengan maksimal 2 satker)</li><li>• Paling lambat 28 Feb 2018 (BA BUN dan K/L dengan 3 satker atau lebih)</li><li>• Paling lambat 16 Mar 2018 (LKBUN)</li></ul>
2	Penyampaian LKPP ( <i>Unaudited</i> ) oleh Pemerintah kepada BPK	26 Maret 2018 (paling lambat)
3	Penyampaian Temuan Pemeriksaan (TP) LKKL dan pembahasan TP dengan K/L	5-16 Maret 2018
4	Penyampaian Temuan Pemeriksaan (TP) LK BA BUN dan pembahasan TP LK BA BUN	2-4 April 2018

No.	Kegiatan	Jadwal
5	Tripartit Asersi Final LKKL dan LKBUN Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jadwal tersebut termasuk Tripartit tingkat Pimpinan pada masing-masing K/L</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Tripartit oleh K/L, Kementerian Keuangan, dan BPK RI dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2018.</li> </ul>	23-29 Maret 2018
6	Penyampaian TP LKPP kepada Pemerintah untuk mendapatkan tanggapan	6-10 April 2018
7	Pembahasan TP LKPP dengan Pemerintah ( <i>technical level</i> dan <i>high level meeting</i> )	10-12 April 2018
8	Penyampaian asersi final LKKL dan LKBUN serta surat representasi KL dan BUN	20 April 2018
9	Penyampaian Konsep LHP SPI dan Kepatuhan LKPP kepada Pemerintah untuk mendapatkan tanggapan dan <i>action plan</i>	30 April 2018
10	Pertemuan antara BPK RI dengan Pemerintah (Penyampaian asersi final LKPP, surat representasi Pemerintah, <i>Action Plan</i> atas Konsep LHP, tanggapan dan <i>exit meeting</i> )	7 Mei 2018
11	Penyampaian LHP LKPP ke DPR, DPD, dan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 Mei 2018 (DPR) – tentatif</li> <li>16-17 Mei 2018 (DPD dan Presiden) - tentatif</li> </ul>

- Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka bersama ini kami sampaikan Jadwal Rinci Pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL Tahun 2017, sebagaimana terlampir. Dalam hal yang sangat khusus, perubahan atas jadwal dimaksud dimungkinkan terjadi dan akan diberitahukan kemudian kepada unit terkait.
- Selanjutnya, kami mengharapkan agar dapat dilakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka mengantisipasi terjadinya permasalahan yang bersifat substantif pemeriksaan maupun permasalahan yang bersifat teknis, misalnya terkait dengan antisipasi agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,  
  
 DIREKTUR JENDERAL  
 MARWANTO HARJOWIRYO  
 NIP. 195906061983121001

Tembusan:

- Menteri Keuangan;
- Wakil Menteri Keuangan;
- Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- Auditor Utama Keuangan Negara II, Badan Pemeriksa Keuangan RI.

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/ SEKRETARIS/JAKSA  
AGUNG MUDA/DEPUTI/KEPALA SEKRETARIAT//WAKIL KEPALA/DIREKTUR UMUM  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN  
ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU  
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA**

1. Sekretaris Jenderal MPR RI;
2. Sekretaris Jenderal DPR RI;
3. Sekretaris Jenderal BPK RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
6. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
25. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
26. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
27. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;
29. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/ SEKRETARIS/JAKSA  
AGUNG MUDA/DEPUTI/KEPALA SEKRETARIAT/WAKIL KEPALA/DIREKTUR UMUM  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN  
ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU  
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA**

31. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
32. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
34. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
35. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara;
36. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
37. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
38. Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
39. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
40. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional;
41. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
42. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI;
43. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
44. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional;
45. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
47. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
48. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
49. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
50. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
51. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
52. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;
53. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
54. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
55. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional;
56. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
57. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
58. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial;
59. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional;
60. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/ SEKRETARIS/JAKSA  
AGUNG MUDA/DEPUTI/KEPALA SEKRETARIAT//WAKIL KEPALA/DIREKTUR UMUM  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN  
ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU  
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA**

61. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara;
62. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI;
63. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
64. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
65. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
66. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
67. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
68. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI;
69. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI;
70. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
71. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
72. Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
73. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
74. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional;
75. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
76. Sekretaris Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
77. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI;
78. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
79. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
80. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
81. Deputi Administrasi Sekretaris Kabinet;
82. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
83. Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
84. Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
85. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
86. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif;
87. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut;

Lampiran I Surat Dirjen Perbendaharaan  
Nomor: S- **64** /PB/2018  
Tanggal: **09** Januari 2018

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/ SEKRETARIS/JAKSA  
AGUNG MUDA/DEPUTI/KEPALA SEKRETARIAT//WAKIL KEPALA/DIREKTUR UMUM  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN  
ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU  
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA**

88. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN untuk Utang Pemerintah dan Hibah Pemerintah;
89. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN untuk Investasi Pemerintah;
90. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN untuk Pengelolaan Kas, Penerusan Pinjaman, Transaksi Khusus, dan Badan Lainnya;
91. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN untuk Transfer ke Daerah;
92. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN untuk Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain.

**JADWAL TERINCI PEMERIKSAAN LKPP, LKBUN, DAN LKKL TAHUN 2017**

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pemeriksaan Interim LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun 2017	Agustus – November 2017
2	<i>Workshop</i> persiapan pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN	11 – 14 Desember 2017
3	Diklat Pemeriksaan LKPP	Minggu II – III Desember 2017
4	<p>Penyampaian database LKPP/LKKL/LKBUN <i>Unaudited</i> Tahun 2017 kepada BPK</p> <p>a. Database SPAN telah disampaikan DJPb kepada BPK</p> <p>b. Database SAI (E-Rekon) telah disampaikan DJPb kepada BPK</p> <p>c. Database SIMAKBMN dan LK BUMN telah disampaikan DJKN kepada BPK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 Desember 2017 (untuk data dengan <i>cut off</i> 12 Des 2017 dengan transaksi sampai dengan 30 Nov 2017 yang telah direkonsiliasi, data 25 tabel)</li> <li>• 5 Januari 2018 (untuk data sampai dengan 31 Des 2017, <i>cut off</i> 2 Jan. 2018, data 25 tabel)</li> <li>• 15 Jan 2018 (untuk data dengan <i>cut off</i> 11 Jan. 2018 dan yang belum direkonsiliasi/belum <i>closing period</i>, data 25 tabel)</li> <li>• 29 Jan 2018 (<i>cut off</i> 26 Jan 2018, data yang telah direkonsiliasi/ telah <i>closing period</i>, tidak termasuk SP3, data 25 tabel) mempertimbangkan batas akhir transaksi satker 10 Jan. 2018 (Perdirjen LLAT) dan waktu pelaksanaan rekon maksimal 14 hari.</li> <li>• 16 Mar 2018 (data yang telah direkonsiliasi/ telah <i>closing period</i>, termasuk data SP3 sampai dengan 21 Feb 2018, data <i>cloning cut off</i> 9 Mar 2018)</li> <li>• 15 Des 2017 (untuk data dengan <i>cut off</i> 12 Des 2017 dengan transaksi sampai dengan 30 Nov 2017 yang telah direkonsiliasi)</li> <li>• 24 Jan 2018 (untuk data dengan <i>cut off</i> 23 Jan 2018 atas transaksi sampai dengan 31 Des 2017, sudah direkonsiliasi tingkat satker/belum <i>closing period</i>)</li> <li>• 28 Feb 2018 (data LKKL <i>unaudited</i> dan termasuk data SP3 sampai dengan 21 Feb 2018)</li> <li>• 15 Des 2017 (Data BMN sd Semester I Tahun 2017)</li> <li>• 28 Feb 2018 (data BMN yang belum direkonsiliasi), pertimbangan karena data BMN secara manual dan adanya revaluasi tahun 2017</li> <li>• 14 Maret 2018 (data BMN yang telah direkonsiliasi),</li> <li>• 28 Februari 2018 (data LK BUMN <i>unaudited</i>)</li> </ul>
5	Pemeriksaan Lapangan LKBUN dan LKKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Jan-16 Mar 2018 (LKKL)</li> <li>• 2 Jan-4 Apr 2018 (LKBUN)</li> </ul>
6	Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan LK BUMN oleh Akuntan Publik	1 Maret – 4 April 2018

**JADWAL TERINCI PEMERIKSAAN LKPP, LKBUN, DAN LKKL TAHUN 2016**

No.	Kegiatan	Jadwal
7	Entry Meeting Pemeriksaan LKBUN dan LKKL	Paling lambat 4 Januari 2018
8	Penyerahan LKKL dan LKBUN <i>Unaudited</i> kepada BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling lambat 21 Februari 2018 (K/L dengan maksimal 2 satker)</li> <li>• Paling lambat 28 Februari 2018 (BA BUN dan K/L dengan 3 satker atau lebih)</li> <li>• Paling lambat 16 Maret 2018 (LKBUN)</li> </ul>
9	Penyerahan Hasil Reviu LKKL oleh Itjen KL kepada BPK	a. K/L dengan maksimal 2 satker: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan Hasil Reviu (CHR) tanggal 21 Februari 2018</li> <li>• Laporan Hasil Reviu (LHR) tanggal 25 Februari 2018</li> </ul> b. K/L dengan 3 satker atau lebih: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan Hasil Reviu (CHR) tanggal 28 Februari 2018</li> <li>• Laporan Hasil Reviu (LHR) tanggal 5 Maret 2018</li> </ul>
10	Penyerahan Hasil reviu LKBUN oleh Itjen Kemenkeu kepada BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan Hasil Reviu (CHR) tanggal 16 Maret 2018 (CHR);</li> <li>• Laporan Hasil Reviu (LHR) tanggal 23 Maret 2018 (LHR)</li> </ul>
11	Penyerahan Hasil Reviu LKPP oleh BPKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan Hasil Reviu (CHR) LKPP tanggal 26 Maret 2018</li> <li>• Laporan Hasil Reviu (LHR) LKPP tanggal 2 April 2018</li> </ul>
12	Penyerahan LKPP ke BPK untuk diperiksa dan <i>Entry Meeting</i> Pemeriksaan LKPP	26 Maret 2018
13	Penyampaian dan pembahasan Temuan Pemeriksaan LKKL dengan K/L	5 - 16 Maret 2018
14	Tripartit Asersi Final LKKL	23 – 29 Maret 2018 (Tripartit Bersama: 27-29 Mar 2018)
15	Penyampaian dan pembahasan TP LK BA BUN, serta tripartit BA BUN	2 - 4 April 2018
16	Penyampaian TP LKPP kepada Pemerintah	6 - 10 April 2018
17	Pembahasan Temuan Pemeriksaan LKPP ( <i>technical level</i> dan <i>high level meeting</i> )	10-12 April 2018
18	Penyampaian asersi final LKKL dan surat representasi KL	20 April 2018
19	Penyampaian Konsep LHP SPI dan Kepatuhan LKPP kepada Pemerintah untuk mendapatkan tanggapan dan <i>action plan</i>	30 April 2018

Lampiran II Surat Dirjen Perbendaharaan  
Nomor: S-64 /PB/2018  
Tanggal: 04 Januari 2018

No	Kegiatan	Jadwal
20	Penyampaian asersi final LKBUN dan surat representasi Menkeu selaku BUN	4 Mei 2018
21	Pertemuan antara BPK dengan Pemerintah (Penyampaian asersi final LKPP, surat representasi Pemerintah, Action Plan Konsep LHP, tanggapan dan <i>exit meeting</i> )	7 Mei 2017
22	Penyampaian LHP LKPP ke DPR, Presiden, dan DPD	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15 Mei 2018 (DPR) – tentatif</li><li>• 16 - 17 Mei 2018 (DPD dan Presiden) - tentatif</li></ul>

--- SELESAI ---